

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka diperlukan uraian batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun batasan konsep penelitian yang dimaksud yakni meliputi manajemen perkotaan, model pemanfaatan ruang dalam tata kota, model pengembangan kolasi perkotaan, dilema konservasi lahan pertanian dalam penyediaan permukiman, dan kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk permukiman yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

A. Manajemen Perkotaan

Manajemen perkotaan merupakan pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan perkotaan sekarang ini. Lea dan Courtney membedakan dua pendekatan manajemen perkotaan, yaitu problem oriented teknokratis dan pendekatan ekonomi politik struktural. Pendekatan pertama lebih memfokuskan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada dalam memecahkan masalah perkotaan, sedangkan pendekatan kedua lebih memfokuskan pada akar permasalahan perkotaan dalam konteks struktur ekonomi politik nasional dan internasional¹.

Perkembangan kota di Indonesia dewasa ini cenderung ke arah perkembangan fisik yang lebih banyak ditentukan oleh banyaknya sarana dan prasarana yang ada. Akibatnya, ruang terbuka hijau terabaikan, bahkan

¹ Nurjadi, Achmad., 2014, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta : JKSG UMY, hlm 129.

menghilangkan wajah alam yang asri. Kawasan hijau sering kali dikalahkan atau di alih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, permukiman, perindustrian, serta untuk sarana dan prasarana kota lainnya².

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia masih terus berlangsung sampai saat ini, jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk yang dipengaruhi tingkat kebutuhan akan papan, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penyediaan lahan baru yang akan dijadikan sebagai permukiman baru. Saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi permukiman, sehingga menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian karena pembangunan yang terjadi, sebagai besar permukiman saat ini dibangun dengan mengubah lahan atau alih fungsi lahan, yang umumnya dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman. penduduk yang cenderung terus bertambah pula dapat mengakibatkan proses pembangunan juga semakin cepat, sehingga menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, ruang yang dibangun semakin banyak dan mendorong ruang terbuka untuk merubah fungsi.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan karena kebutuhan lahan untuk permukiman semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan relatif tetap. Lahan pertanian yang semula berfungsi sebagai areal pertanian berubah fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik yang dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi

² Siti, Eva, ' Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Lingkungan Perkotaan', *Jurnal PWK Unisba*, vol. 1, no. 3, tahun 2007 hlm 1.

lahan non pertanian terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan semakin meningkat. Dengan demikian, kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kelajuan pembangunan dan disisi lain kepadatan penduduk mempunyai dampak negatif dalam perkembangan perkotaan.

B. Model Pemanfaatan Ruang Dalam Tata Kota

Dalam satu kawasan perkotaan terdapat wujud struktural dan wujud pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun yang tidak atau yang disebut dengan tata ruang. Dan seharusnya suatu kota dikatakan berkualitas apabila pembangunannya direncanakan dengan baik dimana wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang telah diatur dengan baik. Rencana tersebut yang dituangkan dalam satu dokumen, adalah Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) yang merupakan alat untuk mengendalikan pembangunan suatu kota, dimana pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Wujud struktural pemanfaatan ruang ini meliputi hierarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat pemerintahan. Sedangkan wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan³.

³ Aprillia, Indri, ' Peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol 4, no 4, tahun 2016, hlm 1697-1710.

Pemanfaatan ruang merupakan bagian dari suatu sistem penataan ruang, dimana penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang⁴.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan ruang yang berkualitas diperlukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Penataan Ruang menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun rencana tata ruang wilayah itu sendiri, yakni tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan, dan arahan pengendalian pemanfaatan.

Dengan demikian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya struktur ruang selayaknya sesuai dengan rencana tata ruang. Sehingga ruang dalam tata ruang dapat dimanfaatkan dengan baik dan diimplementasikan dengan baik pula.

⁴ Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

C. Model Pengembangan Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka di tempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 proses utama, yaitu: a). Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di samping sebagai “*guidance of future action*” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia atau makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia atau makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, b). Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, c). proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdoro atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayah. Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan ukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah⁵.

⁵ Hariyanto & Tukidi, ‘Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otomi Daerah’, *Jurnal Geografi*, vol 4, no 1, tahun 2007, hlm 2-3

Teori-teori perkembangan kota yang dikemukakan oleh E.W. Burgess yaitu teori konsetris, sesuatu kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar disemua bagian-bagiannya. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Oleh karena semua bagian-bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola ruang yang dihasilkan akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya. Secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu pola konsentris ini adalah sebagai berikut⁶:

a. Daerah Pusat atau kawasan pusat bisnis

Daerah pusat kegiatan ini sering disebut sebagai pusat kota. Dalam daerah ini terdapat bangunan utama untuk melakukan kegiatan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya.

b. Daerah Peralihan

Daerah ini kebanyakan di huni oleh golongan penduduk kurang mampu dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Penduduk ini sebagian besar terdiri dari pendatang yang tidak menetap, terutama ditinjau dari tempat tinggalnya. Di beberapa tempat pada daerah ini terdapat kegiatan industri ringan.

c. Daerah Pabrik dan Perumahan Pekerja

Daerah ini dihuni oleh pekerja-pekerja pabrik yang ada di daerah ini. Kondisi perumahan sedikit lebih buruk dari pada daerah peralihan, hal ini disebabkan karena kebanyakan pekerja yang tinggal disini adalah dari golongan pekerja kelas rendah.

⁶ Yunus, Sabari, 1999, *Struktur Tat Ruang Kota*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm 254.

d. Daerah Perumahan yang lebih baik kondisinya

Daerah ini dihuni oleh penduduk yang lebih stabil keadaannya dibanding dengan penduduk yang penghuni daerah yang disebut sebelumnya, baik ditinjau dari permukimannya maupun perekonomiannya.

e. Daerah Penglaju.

Daerah ini mempunyai tipe kehidupan yang dipengaruhi oleh pola hidup daerah pedesaan disekitarnya. Sebagian menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan dan sebagian yang lain menunjukkan ciri-ciri kehidupan pedesaan, Kebanyakan penduduknya mempunyai lapangan pekerjaan nonagraris dan merupakan pekerja-pekerja penglaju yang bekerja di dalam kota, sebagian penduduk yang lain adalah penduduk yang bekerja di bidang pertanian.

Teori pertumbuhan kota menurut Spiro Kostof, Kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk, sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah samapi hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu. Bentuk kota ada dua macam yaitu geometri dan organik. Terdapat bentuk perkotaan yang didasarkan pada bentuk geometri kota yaitu planned dan unplanned⁷.

a. Bentuk planned (terencana) dapat dijumpai pada kota-kota eropa abad pertengahan dengan pengaturan kota yang selalu regular dan rancangan bentuk geometrik.

⁷ *Ibid.*

- b. bentuk unplanned (tidak terencana) banyak terjadi pada kota-kota metropolitan, dimana satu kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi, sehingga akhirnya kota akan memiliki bentuk tidak teratur yang kemudian disebut dengan organik pattern, bentuk kota organik tersebut secara spontan, tidak terencana dan memiliki pola yang tidak teratur dan non geometris.

Menurut Kevin Lynch, definisi model organik kota biologis adalah kota yang terlihat sebagai tempat tinggal yang hidup, memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakannya dari sekedar mesin, mengatur diri sendiri dan dibatasi oleh ukuran dan batas yang optimal, struktur internal dan perilaku yang khas, perubahan tidak dapat dihindari untuk mempertahankan keseimbangan yang ada, menurut bentuk fisik organik⁸:

- a. Membentuk pola radial dengan unit terbatas.
- b. Memiliki fokus sentral.
- c. Memiliki non geometrik atau membentuk lengkung tak beraturan.
- d. Material alami.
- e. Kepadatan sedang sampai rendah.
- f. Dekat dengan alam.

⁸ *Ibid.*

Di dalam model organik ini, organisasi ruang telah membentuk kesatuan yang terdiri dari unit-unit yang memiliki fungsi masing-masing. Kota terbentuk organik mudah untuk mengalami penurunan kualitas karena perkembangannya yang spontan, tidak terencana dan sepotong-potong. Masyarakat penghuni kota ini bermacam-macam yang merupakan percampuran anatar berbagai macam manusi dalam suatu tempat yang memiliki keseimbangan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, saling menyimpang tetapi juga saling menuduku datu sama alain. Kota organik memiliki ciri khas pada kerjasama pemeliharaan lingkungan sosial oleh masyarakat.

Teori-teori pertumbuhan kota, terdapat beberapa pandanagn yang berkaitan dengan perubahan suatu kawasan dan sekitarnya sebagai bagian dari suatu kawasan perkotaan yang lebih luas. Dalam proses perubahan yang menimbulkan peningkatan skala perubahan cukup besar dalam lingkungan termasuk di dalamnya, perubahan penggunaan lahan secara organik, terdapat beberapa hal yang bisa diamati yaitu:

1. Pertumbuhan terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit atau terus menerus.
2. Pertumbuhan yang terjadi tidak dapat diduga dan tidak diketahui kapan dimulai dan kapan akan berakhir, hal ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melatar belakanginya.
3. Proses perubahan lahan yang terjadi bukan merupakan proses sgmental yang berlangsung tahap demi tahap, tetapi merupakan proses yang komprehendif dan berkesinambungan.

4. Perubahan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam populasi pendukung.
5. Faktor-faktor penyebab perubahan lainnya adalah kesan, optimalnya kawasan, penataan yang maksimal pada kawasan dengan fungsi-fungsi yang mendukung, penggunaan struktur sesuai pada bangunan serta komposisi pada kawasan.

Konsep pengembangan wilayah perkotaan, kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek keruangan lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut.

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendingkan lahirnya konsep pengembangan wilayah perkotaan yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai dengan daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk berkembang tanpa konflik dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah perkotaan yang didasarkan pada penataan ruang.

Tiga kelompok konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional dan konsep pendekatan. Konsep pusat

pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah.

Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia.

Dengan demikian teori pertumbuhan kota dapat dipengaruhi dengan adanya pengaruh budaya tertentu, yang terjadi pada saat ini kota metropolitan banyak pertumbuhan kota yang menganut Bentuk Unplanned (tidak terencana), dimana satu segmen kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi, sehingga akhirnya kota akan memiliki bentuk semauanya.

D. Dilema Konservasi Lahan Pertanian Dengan Penyediaan Pemukiman

Konversi lahan pertanian semakin marak terjadi, dalam situasi dimana perluasan lahan pertanian semakin sulit dilakukan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, ditambah tantangan perubahan iklim yang membuat produksi komoditas pertanian terganggu. Konversi lahan bertujuan mendapatkan tingkat keberlanjutan produktifitas lahan dengan menjaga

kehilangan lapisan oleh lahan di bawah ambang batas yang diperkenankan⁹. Sedangkan konversi lahan menurut Morgan mengemukakan bahwa upaya mengurangi kehilangan lahan sehingga erosi yang terjadi sebagaimana peristiwa secara alami, melalui berbagai strategi termasuk memahami proses erosi.

Konversi lahan pertanian selalu menuntut peran petani sebagai subyek utama pembangunan pertanian. Peran petani yang salah satunya tercermin dari mereka yaitu dalam konversi lahan pertanian, tidak terlepas dari kondisi daya dukung lahan pertanian. Kekuatan dasar yang mendasari kekuatan struktur sosial dan pola interaksi sosial dalam kelompok permukiman masyarakat. jika sumber daya alam yang tersedia sangat melimpah, tidak ada keharusan untuk mengatur sistem pengelolaan diantara kelompok tersebut. Namun berbeda jika sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas, kelompok akan mengorganisasikan sistem pengelolaan sumber daya alam tersebut¹⁰, jadi kerjasama antar kelompok masih kurangnya kesadaran.

Menurut Arsyad menjelaskan konversi lahan sebagai pengawetan lahan yang dimaksudkan sebagai penempatan sebidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah¹¹. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani melaksanakan konservasi lahan, menurut Lynch, L dan W.N. Musser, masalah ketahanan pangan, kondisi ekonomi

⁹ Suripin, 2004, *'Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air'*, Yogyakarta, Hlm. 11-2

¹⁰ Kurniasih, Dian, ' Analisis Pengaruh Daya Dukung Lahan dan Non Behavioural Causes Terhadap Perilaku Petani Dalam Konversasi Lahan sawah di Kabupaten Kulon Progo', *Jurnal Widyariset*, vol 16, no 1, tahun 2013, Hlm 59-70.

¹¹ Arsyad, S, 2006, *'Konservasi Tanah dan Air'*, Bogor, Hlm 9-8.

masyarakat setempat. Dan nilai keteneraman menimbulkan kebutuhan untuk menentukan kebijakan dan penelitian dalam pengamanan lahan pertanian. Gardner mengemukakan empat keuntungan yang dapat diperoleh dari menjaga produktifitas lahan pertanian yaitu keamanan pangan tingkat lokal maupun nasional, penyerapan tenaga kerja pada agroindustri, penggunaan lahan pedesaan maupun wilayah urban secara efisien, dan perlindungan atau penjagaan keamanan lingkungan dan pedesaan¹².

Arah gerak pertanian modern ternyata telah menghasilkan dilema di sektor pertanian. Di satu sisi, pertanian modern memudahkan petani untuk mengolah pertanian secara lebih cepat dan mudah, namun di sisi lain lahan rusak akibat tak berjalan seimbangannya penggunaan lahan dan konservasi lahan. Hal itu menggambarkan potret pertanian modern yang hanya mementingkan hasil secara cepat, tanpa mempertimbangkan kepentingan terjaganya ekosistem lahan pertanian. Dalam kondisi seperti itu, ruang konservasi menjadi penting untuk dihadirkan dalam setiap usaha pertanian. Konservasi lahan menjamin kelangsungan usaha pertanian, terjaganya kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah yang rusak.

Aspek konservasi berupa konservasi tanah dan air melalui peningkatan infiltrasi, sehingga cadangan air tanah tersedia dan dapat mencegah terjadinya erosi baik oleh air karena aliran permukiman, maupun akibat angin dan salinasi. Secara umum infiltrasi dipengaruhi oleh :

¹² Suwanto & Sapta Anantanyu, ' Model Partisipasi Petani Lahan Kering Dalam Konservasi Lahan', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol 13, no 2, tahun 2012, Hlm. 222-232

1. Intensitas hujan atau irigasi.
2. Kandungan lengas tanah.
3. Faktor tanah.

Konversi lahan pertanian selama ini dipandang menimbulkan efek yang negatif pada lahan permukiman. Berkurangnya lahan pertanian maka akan berpengaruh pada berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan permukiman. Konversi lahan dapat menjadi potensi maupun kendala, yaitu konversi lahan pertanian menjadi permukiman diimbangi dengan pencetakan lahan pertanian baru. Permasalahan Konservasi Lahan Pertanian, antara lain¹³:

1. Jenis degradasi makin beragam dan intensif

Seperti dijelaskan di atas, degradasi lahan pertanian Indonesia beragam, yaitu erosi, pencemaran kimiawi, longsor, kebakaran, konversi, dan lain-lain. Penyebab utamanya adalah kelalaian dan keserakahan manusia, yang tidak memperhatikan karakteristik alam seperti curah hujan yang tinggi, lereng, dan kondisi tanah, sehingga laju degradasi makin cepat dan intensif. Hal ini menyebabkan lahan pertanian mengalami degradasi yang makin berat.

2. Diseminasi dan adopsi teknologi lambat

Samapi saat ini, masih dapat dijumpai praktek pertanian tanpa teknik konservasi, seperti pada sistem ladang berpindah di luar Jawa. Bahkan pada

¹³ Pemerintah kabupaten Grobogan, 2011, *Tantangan Konservasi Lahan Pertanian*, diakses pada 11 Maret 2017, <https://grobogan.go.id/info/artikel/583-tantangan-konservasi-lahan-pertanian>.

sistem pertanian, penerapan teknik konservasi tanah belum merupakan kebiasaan petani dan belum dianggap sebagai bagian penting dari pertanian.

Salah satu sebabnya adalah karena diseminasi teknologi konservasi tanah sangat lambat. Dari sumber teknologi melalui publikasi, seminar, dan simposium, disampaikan kepada penyuluh, kemudian ditranfer kepada pengguna lahan. Selanjutnya, para petani memerlukan waktu lama juga untuk memahami dan mengadopsi teknologi tersebut, lebih-lebih bila tidak memberikan keuntungan dalam waktu singkat setelah penerapannya. Proses diseminasi dan adopsi teknologi tersebut lebih lambat lagi mengingat kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian saat ini kurang kondusif untuk diseminasi secara cepat.

3. Kebijakan pemerintah dan sosial ekonomi masyarakat

Penyebab utama rendahnya adopsi teknologi konservasi bukanlah keterbatasan teknologi, tetapi lebih kuat disebabkan oleh masalah non teknis, yaitu masalah kebijakan, sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah sangat menentukan keberhasilan upaya pengendalian degradasi tanah. Namun, selaras dengan tantangan yang dihadapi, selama ini prioritas utama program pertanian lebih ditunjukkan kepada peningkatan produksi bahan pangan dan pertumbuhan ekonomi secara makro, sehingga aspek kelestarian sumber daya lahan tertinggal. Selain itu, masalah sosial juga sering menghambat penerapan konservasi tanah, antara lain sistem kepemilikan dan hal atas lahan, sempitnya lahan garapan petani, dan tekanan penduduk. Kondisi ekonomi petani yang pada umumnya rendah, sering menjadi alasan bagi

mereka untuk mengabaikan konservasi tanah, termasuk mendorong cepatnya konservasi lahan pertanian.

4. Perkembangan IPTEK konservasi tanah

Di Indonesia, jenis degradasi tanah makin banyak dan intensif, yang tentunya diikuti dengan perkembangan IPTEK konservasi tanah. Namun perkembangan IPTEK tersebut belum mampu mengejar perubahan penggunaan lahan yang sering bersifat eksploitatif, tanpa memperhatikan dalam jangka panjang.

E. Kebijakan Pemerintahan Dalam Penyediaan Tanah Untuk Permukiman

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Tanah Pertanian

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan. Pasal 54 menjelaskan bahwa untuk menjamin tercapainya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja, pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah.

Peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan lahan disebut dalam Undang-undang bahwa pemerintah Daerah harus melakukan pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Pelaporan meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan dan pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian. Pengendalian

lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan. Dengan demikian peran pemerintah terdapat perlindungan lahan pertanian dapat mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah dan Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menjelaskan bahwa pembangunan prasarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang. Pembangunan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan yaitu kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah, keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian, dan ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antar kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi kasatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan

perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan baru.

Prasarana dan sarana (*infrastructure*) sering diartikan sebagai bangunan fisik untuk kesejahteraan dan keselamatan umum (seperti jalan, pelabuhan, bandara, tenaga listrik, telekomunikasi, irigasi, air bersih, dan sanitasi), merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan sosial-politik (sebagaimana diindikasikan oleh daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik dan stabilitas sosial politik yang mantap).

Pada hakekatnya Pembangunan infrastruktur merupakan tugas dan tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun demikian dalam operasionalnya dapat melibatkan peran aktif pihak swasta maupun masyarakat. Peran penduduk lokal sangat minim dalam pengembangan wisata di sekitar wilayah mereka, penduduk lokal belum melihat adanya rencana yang jelas dari pihak pemerintah sehingga tidak mendorong masyarakat untuk aktif mengembangkan kawasan wisata pantai ini. Keterlibatan atau partisipasi

masyarakat lokal dalam pengembangan infrastruktur menjadi penting termasuk dalam kaitannya dengan upaya keberlanjutan pariwisata itu sendiri.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan karena pemerintah harus menyediakan infrastruktur dalam arti yang luas yakni ketersediaan sarana prasarana publik, energi listrik, air bersih / air minum dan telekomunikasi. Pemerintah juga berperan penting dalam posisinya sebagai *regulator*, memberi kepastian hukum, berpihak kepada yang lemah dan berlaku adil yang bertanggung jawab.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Permukiman

Pada Undang-undnag no 1 tahun 2011 bahwa kebijakan pemerintah pada penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman bagi rakyatnya diarahkan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia.
2. Ketersediaan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan.
3. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanag yang berdaya guna dan berhasil guna

4. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara.
5. Mendorong iklim investasi asing.

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik di daerah perkotaan yang berpenduduk padat maupun di daerah pedesaan yang ketersediaan lahannya lebih luas, perlu terwujudnya dengan memperhatikan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan. Pemerintah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan pembangunan prasarana, sarana di lingkungan hunian.

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diamanatkan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.